

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA CIPANG KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH

DESI SATRIA
NIM. 10675005064

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

**ANALISIS IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
DI DESA CIPANG KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

OLEH : DESI SATRIA

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan pemberian dari pemerintah. Proses Otonomi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang di miliki oleh desa. Pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia hanya dapat di capai melalui proses terpadu adanya kerjasama pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Agar Otonomi terwujud tentunya tidak dapat dipisahkan peran seorang kepala desa dan aparatur pemerintah desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Penelitian ini di lakukan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang kanan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Otonomi Desa. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1476 orang karena mengingat besarnya jumlah masyarakat Desa Cipang Kanan maka peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 53 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan diketahui bahwa Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian berupa kuesioner yang peneliti buat. Daribhasil kuesioner responden yang menjawab kurang baik sebanyak 44% dari jumlah sampel.

Dan dari hasil penelitian dapat dilihat kurang berjalannya pembangaunan yang ada di desa seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum yang ada di desa bannyak yang belum di bangun. Pada akhir penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pemerintahan desa agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena untuk terciptanya pemerintah yang baik dan lebih maju harus bisa memberika pelayan kepada masyarakat, an juga lebih meningkatkan pembangunan yang ada di desa agar Desa Cipang Kanan tidak jauh tertinggal dari Desa yang ada di sekitarnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Abstraks	ii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Otonomi	17
B. Desa	23
1. Pengertian Desa	22
2. Bentuk dan susunan Organisasi	28
3. Perangkat Desa	29
4. Keuangan Desa	30
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa	32
C. Variabel Penelitian	34
D. Hipotesis	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Populasi dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA

A. Gambaran Umum	40
B. Kedudukan Pusat Pemerintahan Desa Cipang Kanan	42
C. Susunan Organisasi	42
D. Uraian Tugas dan Fungsi	43
E. Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Cipang Kanan	49
F. Jumlah dan Komposisi Masyarakat	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	52
B. Implementasi otonomi desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan bidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi	55

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Secara historis desa merupakan embrio terkecil dari terbentuknya pemerintahan politik dan perintah Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia ini terbentuk struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif sendiri dan tanpa campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Pada saat pemerintaha orde baru tatanan ini mulai berkurang dan mengalami proses kehancuran yang mana pada undang-undang No.5 Tahun 1979 yang membahas tentang pemerintahan Desa dan kelurahan, penguasa melakukan kebijakan sentralisasi, birokratisasai dan penyeragaman pemerintah tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat adat dan komunitas asli, seluruh pemerintah terendah di Indonesia dipaksa untuk seragamkan menjadi desa sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Setelah terjadinya proses Reformasi pada tahun 1998 maka dengan seiringnya waktu pemerintah melakukan pencabutan terhadap UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan kelurahan, dan lahir lah Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemberlakuan Otonomi daerah di Indonesia dan kemudian di revisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam menyelenggarakan Pemerintah. Dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintah lebih mengutamakan proses desentralisasi. Disamping itu penyelenggaraan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kewenangan lebih besar merupakan salah satu esensi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Persiapan azas Desentralisasi serta pemberian Otonomi kepada daerah akan semakin mendukung kemandirian daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, penyelenggaraan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas mengandung makna pemberdayaan.

Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan di daerah.

Pembangunan saat ini sangat digalakkan oleh pemerintah, tetapi bukan saja tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. tujuan Pembangunan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada hakikatnya Indonesia adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini berarti bahwa Pembangunan Nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata-mata tetapi butuh keselarasan dan keseimbangan.

Pembangunan dapat diartikan bahwa Pembangunan adalah suatu usaha dan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang cukup berkembang hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh perusahaan-perusahaan dan non Organisasi yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu khususnya dan Riau umumnya.

Seiring Pesatnya perkembangan dengan letak Provinsi Riau yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah di Desa Cipang Kanan khususnya tetapi belum bisa kelola oleh Desa Cipang Kanan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan Desa Cipang Kanan. Untuk mensejahterakan masyarakat Desa Cipang Kanan banyak yang harus dibenahi

dari kondisi Desa Cipang Kanan saat ini. Proses Pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana Desa Cipang Kanan, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dan lembaga lainnya yang ada di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menyangkut tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 adalah awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu.

Undang-undang 32 Tahun 2004 mengakui adanya Otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang administratif seperti desa yang dibentuk pemekaran desa ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dari desa itu sendiri.

Otonomi Desa adalah Otonomi asli, yaitu yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Pemimpin jalannya Pemerintahan Desa Cipang Kanan
2. Membina kehidupan masyarakat Desa Cipang Kanan
3. Memelihara Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Cipang Kanan
4. Mendamaikan Perselisihan masyarakat di Desa Cipang Kanan
5. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
6. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa
7. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban diatas Kepala Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Mempunyai Fungsi:

1. Melaksanakan Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah
4. Melaksakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Cipang Kanan

5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa Cipang Kanan
6. Melaksanankan urusan pemerintahan lainnya

Untuk memperjelas arah kerja Kepala Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menetapkan visi yaitu: “Terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera”.

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan yang handal.

Visi tersebut diuraikan dalam program kerja Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
2. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat
3. Terwujudnya pemerintahan yang handal, bersih dan berwibawa
4. Mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Iman dan taqwa

Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu mempunyai program kerja yang telah di tetapkan yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan yang handal
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
7. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
8. Pencatatan dan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa Cipang Kanan.

Program kerja Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Dapat dilihat dalam tabel pelaksanaan program kerja:

Tabel I.1 : Program kerja Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Bidang kegiatan	Program kerja	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Urusan Pembangunan	5	2	3
2.	Urusan Pemerintahan	4	2	2
3	Urusan Kesejahteraan Rakyat	4	2	2
4	Urusan Ketentraman dan Ketertiban	2	2	0
5	Kepala Dusun	3	3	0

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 : Urusan Pembangunan

No	Jenis-jenis Kegiatan	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Jalan Desa	X	✓
2.	Jembatan Desa	X	✓
3.	Pasar Desa	✓	X
4.	Irigasi Desa	X	✓
5.	Mesjid Desa	✓	X

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat di lihat jumlah pembangunan yang belum bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa, ada 3 (tiga) Urusan Pembangunan yang belum terlaksana yaitu jalan Desa yang belum sepenuhnya di bangun yang bisa menunjang aktifitas di desa, dan juga pada urusan pembuuatan jembatan yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Desa, dan pada urusan Irigasi untuk pengairan belum diperhatikan oleh desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

Tabel 1.3 : Urusan Pemerintahan

No	Jenis-jenis Kegiatan	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Pembuatan Peraturan Desa	X	✓
2.	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	X	✓
3.	Kerja sama antar Desa	✓	X
4.	Pembentukan lembaga Kemasyarakatan	✓	X

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) kegiatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu pada pembuatan peraturan Desa yang belum terlaksana dengan baik dan juga pada pembentukan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana.

Tabel 1.4 : Urusan Kesejahteraan Rakyat

No	Jenis-jenis Kegiatan	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Puskesmas Desa	X	✓
2.	Posyandu Desa	✓	X
3.	Beras Miskin	X	✓
4.	Pendidikan	✓	X

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat pada urusan kesejahteraan rakyat ada dua (2) program yang belum terlaksana yaitu pada program puskesmas Desa dan Beras Miskin yang belum terealisasi dengan baik.

Tabel 1.5: Urusan Ketentraman dan Ketertiban

No	Jenis-jenis Kegiatan	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Siskamling	✓	X
2.	Lembaga Adat	✓	X

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban sudah terlaksana dengan baik dan sudah di jalankan dengan baik.

Tabel 1.6 : Kepala Dusun

No	Jenis-jenis Kegiatan	Terlaksana	Belum Terlaksa
1.	Kepala Dusun I	✓	X
2.	Kepala Dusun II	✓	X
3.	Kepala Dusun III	✓	X

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat program kerja pada urusan kepala Dusun sudah terlaksana dengan baik di mana di setiap Dusun Sudah ada kepala Dusun yang terpilih.

Program kerja yang ditetapkan tersebut masih belum terealisasi, untuk mengukur Implementasi Otonomi Desa Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menata sistem pemerintah terendah di Indonesia, termasuk salah satunya Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu dari system sentralisasi kembali ke Otonomi Desa dengan tujuan untuk meletakkan kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah, hal ini dapat dilihat pada pencanangan proses restrukturisasi pemerintah terendah mengelembung banyak harapan tentang perubahan dalam memperbaiki tata kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah pada level akar input (Grass Roots)

Hal ini tercermin dari tujuan awal pelaksanaan kembali ke Desa.

- a. Memperkuat posisi tawar masyarakat, sehingga bisa mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan mereka sesuai gerak Otonomi Daerah serta dapat

mempengaruhi kebijakan publik untuk lebih memihak pada kepentingan rakyat.

- b. Memperkuat akses kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai payung hukum dari pengakuan Otonomi Desa, maka dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintah lokal yang betul-betul demokrasi dan otonom sebagai hasil dari realisasi seluruh aturan tersebut, berdasarkan aturan yang ada dan berkaitan dengan konsep otonomi desa yang terdapat pada Bab XI, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa berhak mengatur dan mengurus Desanya sendiri melalui kelembagaan yang ada dalam Desa sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam suatu desa tersebut.
- b. Membuat keputusan Desa yang mengikat secara kolektif asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditentukan.
- c. Mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.
- d. Untuk memilih pemimpinnya, sebagai eksekutif dan legislatif dalam Desa sehingga residu sistem pemerintahan dan nach fregremessen dapat lebih cepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang merupakan penguat atau penjelasan yang lebih jelas dari Undang-undang No 32 tahun 2004 di mana Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Pemusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan Otonomi Desa adalah pelestarian Kearifan Lokal yang ada di Desa Cipang Kanan yaitu menanam padi secara bersama di ladang dan dimana dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, dan kemandirian. Dan sekarang tradisi ini sudah mulai memudar di kalangan masyarakat Desa Cipang Kanan yang mana seharusnya tradisi ini dilestarikan karna didalamnya terkandung semangat gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Sesuai dengan program kerja yang di buat Desa Cipang Kanan belum maksimal menjalankan Implementasi Otonomi Desa Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu hal ini dapat dilihat pada tabel belum terlaksananya beberapa program kerja yang di buat.
2. Masih Rendahnya Kesadaran Pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kerja yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas kerja.

Dan oleh Sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Implementasi Otonomi Desa Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang di temui di lapangan dalam implementasi Undang-undang Otonomi Desa di Desa Cipang kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang di kemukan di latar belakang masalah maka dapat di simpulkan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu”

Setelah lahirnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan peluang kepada desa untuk mengelola sumber-sumber kekayaan desa maupun pembenahan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik, sehingga dapat terwujudnya suatu tatanan pemerintahan kearah lebih baik dari sebelumnya.

Melihat keadaan Desa Cipang Kanan yang mempunyai potensi yang cukup memadai seperti Sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Otonomi Desa yang ada di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implimentasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Sebagai Tolak untuk melihat pelaksanaan Undang-undang Otonomi Desa bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi Desa Taratak Buluh dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan system pemerintahan Desa.
- c. Bagi Penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.
- d. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi bahan kepustakaan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dibagi dalam VI (enam) pokok bahasan atau 6 Bab, masing-masing Bab dibagi dalam beberapa sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta sistematika penulisan

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menyajikan beberapa teori yang melandasi penulisan, dan definisi konsep otonomi desa

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DESA CIPANG KANAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat Desa Cipang Kanan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi, uraian tugas, Visi dan Misi serta jumlah masyarakat.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Otonomi

HAW. Widjaja (2005:17) Proses peralihan dari sistem dekonsentralisasi disebut pemerintah daerah dengan Otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-undang Desentralisasi (*Decentrakisatie wet*) Tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi. Sementara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi tendensi kearah desentralisasi.

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok, unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (simultan) merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat daerah /wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah Nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan di selenggarakannya Desentralisasi menjelma menjadi daerah

otonom. Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut *C.S.T. Kansil* Otonomi (2006:684) Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat tiga pola daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten, dan kota Provinsi di samping sebagai daerah otonom juga di tetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asa Otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarah kan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi yang lebih dikenal dengan Otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan yang diawasi oleh pemerintahan pusat. Dengan adanya Otonomi Daerah

maka setiap pemerintahan yang ada di daerah juga mengalami perubahan termasuk juga Desa.

Menurut *Himawan S.Pambudi* (2003:5) Otonomi Desa merupakan sebuah harapan untuk Desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, Otonomi Desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada Desa dan dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan atas apa yang diusahakan kekuasaan orde baru. Selain itu, gagasan ini memuat pola mengenai konstruksi Desa masa depan, yaitu sebuah bentuk ideal yang hendak dicapai.

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 12, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pengembangan otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kebijakan umum Pembangunan Pemerintah kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Visi pengembangan Otonomi Desa harus tetap mengacu kepada visi Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu merupakan visi akselerasi karena Rencana Umum Pembangunan Otonomi Daerah (RUPOD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Dalam rangka mewujudkan visi akselerasi tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yang di rumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas tata Kemasyarakatan
- b. Meningkatkan Kapasitas tata Ruang dan Lingkungan
- c. Meningkatkan kapasitas tata kepemimpinan kepala desa
- d. Meningkatkan kapasitas tata pemerintahan desa

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas Desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah yakni dengan memberikan keluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya, azas ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi: Negara Kesatuan Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunannya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam system pemerintahan Negara serta hak asal-usul didalam daerah yang bersifat istimewa. (HAW.Widjaja, 2003:2).

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003:12) menyebutkan bahwa implemantasi Otonomi Daerah pada prosesnya diarahkan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan menciptakan good governance.

Sebagai wujud penghormatan hak asal-usul identitas kedaerahan, maka di keluarkan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Kebijakan tersebut memberi kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kebijakan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut. Pendapat Dadang Juliantara (2003:72,73) yang memandang ada

tiga cara perubahan yang merupakan wilayah strategis dalam proses transformasi ketika kita hendak mewujudkan Otonomi lokal/Otonomi Desa, yaitu antara lain:

a. Bidang Politik/ pemerintahan

Arena ini merupakan wilayah pengaturan kekuasaan. Pada masa politik yang terbangun adalah sebuah tatanan yang menutup pintu bagi partisipasi masyarakat. Sistem politik yang dibangun bekerja melayani kepentingan penguasa dan bersifat anti rakyat. Upaya perubahan sudah tentu harus masuk arena ini, yakni mendorong perubahan system politik, sehingga terbangun sebuah tatanan politik baru yang lebih bersih, transparan, responsif dan legitimasi, serta dibangun berdasarkan partisipasi yang intensif dan konstruktif.

b. Bidang sosial Budaya

Pengalaman Desa-desa dengan proyek modernisasi meninggalkan akibat berupa terjadinya proses yang bisa di katakan sebagai penghancuran institusi local. Namun persis di situ pula gerakan masyarakat sipil telah menjadi masalah sosial budaya sebagai pintu masuk dalam proses penguatan masyarakat atau institusi lokal. Upaya-upaya pembangunan skema reproduksi sosial dan pengembangan identitas budaya menjadi bagian penting dari proses tersebut. Ujungnya adalah bahwa proses rekontruksi haruslah masuk pada upaya mentransformasi sistem budaya untuk bisa mengembalikan komunitas lokal kepada kebudayaan mereka.

c. Bidang Ekonomi

Arena ini merupakan wilayah yang menjadi tempat pengaturan masalah sarana reproduksi, sistem reproduksi dan distribusi hasil reproduksi. Masuknya upaya

perubahan kedalam arena ini lebih di maksudkan untuk membangun tata ekonomi baru yang populistik yaitu ekonomi yang berbasiskan rakyat.

Pengembangan undang-undang otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan, dan lingkungan sosial masyarakat yang dinamis. Sebagai sub sistem pemerintahan nasional, memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Hal ini disadari oleh pemerintah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan. Untuk itu kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan desa menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang, kebijakan tersebut antara lain :

1. Tap MPR Nomor IV tahun 2000 tentang Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. UUD 1945 (Amandemen Kedua), Pasal 18 dan 18B.
3. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Perpres No. 7 tahun 2005).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Propinsi dan Rencana Strategis Kabupaten/kota.

Otonomi Desa di akui secara riil/nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administrasi Kabupaten atau Kecamatan.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut *HAW.Widjaja* Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas kita dapat menemui banyak istilah di Negara kita tentang masyarakat tersebut seperti Dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati bagi Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat Desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan baik mata pencarian maupun adapt istiadat.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 208 disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan perda, berdasarkan peraturan pemerintahan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 Pasal 5 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintahan propinsi dan atau pemerintahan kabupaten.

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Desa adalah:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan BPD.
 - e. Membina perekonomian Desa
 - f. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat Desa yang berkemampuan untuk mandiri (*HAW. Widjaja, 2005:84*).

Sebagai wujud Demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau Sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala Desa. di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat.

Menurut Yulianti (2003:240), Desa memiliki ciri-ciri yang khas sebagaimana yang dicirikan sebagai berikut:

1. Secara Umum:
 - Dengan bahasa ibu yang kental
 - Tingkat pendidikan yang relatif rendah

- Mata pencarian yang umumnya di sektor pertanian.
- 2. Secara Ekonomi:
 - Dengan komunitas masyarakat yang memiliki model produktif yang khas.
- 3. Secara Sosiologi:
 - Dengan dua makna positif dan negatif
 - Makna positif yang melekat di desa antara lain kesamaan dan kejujuran
 - Makna negatif seperti kebodohan dan keterbelakangan.
- 4. Secara Hukum dan Politik:
 - Dengan adanya otonomi yang membangun tahta kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk, yang sebenarnya diketahui sendiri oleh masyarakat Desa bukan pihak luar.

Kewenangan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturan kepada desa
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala

aspek kehidupan Desa, baik dalam bidang pelayanan (public good), pengaturan (public regulation) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2003, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini komposisi dan struktur masyarakat pedesaan jauh berbeda, generasi muda penerus adalah komponen yang dominan, yang justru akan membingungkan dengan upaya pengembalian nilai-nilai lama. Perlu disadari bahwa kenyataan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif. Landasan pemikiran inilah yang mendasari perlunya mengembangkan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dengan 3 (tiga) fungsi pokok, yakni sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat dan agen pembaharuan.

Pertimbangan kesejahteraan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah

memberikan landasan sebagai arah pengembangan Desa dimasa yang akan datang. kebijakan pemerintah untuk pengembangan desa ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana terdapat pada tap MPR diatas,Rekomendasi No. 07, Pasal 18B, ayat 1 (satu) dan 2 (dua) UUD 1945 Amandemen_2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, seta terakhir dengan Perpes No. 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Maksud penyusunan Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa oleh pemerintah adalah memberikan arah dan pedoman pengembangan Otonomi Desa bagi Pemerintah daerah agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan fokus utama pembanguna pedesaan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa adalah untuk menciptakan sinergitas pengembangan Otonomi Desa melalui peleksanaan pengembangan antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat Pemerintah secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut pasal 202 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya

3. Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

Menurut C.S.T Kansil (2006:618), di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Perwakilan Desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, Perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam satu (1) dapat terdiri atas:

- a. Unsur staf, yaitu unsur pelayan seperti sekretariat Desa dan atau Tata Usaha
- b. Unsur Pelaksanaan, yaitu unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan
- c. Unsur wilayah, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlahnya dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat satu (1) perangkat desa bertanggungjawab Kepada Kepala Desa. Perangkat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun Tata cara dari pengangkatn Perangkat Desa yaitu:

- a. Berpendidikan Paling rendah Tamatan SMA atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan
- c. Mempunyai Kemampuan di Bidang administrasi di bidang perkantoran

- d. Mempunyai Pengalaman di Bidang administrasi Keuangan dan di bidang perencanaan
- e. Bersedia Tinggal di Desa bersangkutan

Dalam Peraturan Pemerintah Rokan Hulu pasal enam (6) di sebutkan setiap sekretaris Desa itu dari Pegawai Negri Sipil, dan bagi Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negri Sipil di angkat oleh sekretaris Daerah dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang di minta oleh Pemerintahan Daerah Setempat.

Dalam Pengangkatan Perangkat Desa lainnya maka Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Dalam proses dan prosedur pengangkatan perangkat Desa lainnya di tetapkan peraturan Desa yang bersangkutan, adapun masa jabatan perangkat Desa adalah selama Dua belas Tahun (12) dan dapat di angkat kembali dalam satu (1) kali masa Jabatan berikut nya.

Dan apabila perangkat Desa sudah berusia Enam puluh (60) Tahun meski belum habis masa jabatannya harus mengundurkan diri.

4. Keuangan Desa

Menurt C.S T Kansil (2006:810) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa.

Sumber-sumber pendapatan Desa:

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli desa meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

e. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pasal 2 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pasal Sebelas (11) Sumber kekayaan Desa terdiri dari:

- a. Tanah kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Tambatan Perahu
- e. Bangunan Desa
- f. Pelelangan Ikan yang di kelola Desa
- g. Lain-lain Kekayaan Milik Desa

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman kepada perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga yang dimaksud disini adalah Rukun Tetangga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Tugas lembaga kemasyarakatan adalah:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak, prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat

- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat, susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
- d. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang berhubungan dengan Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa meliputi tiga Bidang:

1. Bidang Politik/Pemerintahan
2. Bidang Sosial Budaya
3. Bidang Ekonomi

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang di kemukakan diatas maka di rumuskan suatu hipotesa sebagai berikut:

“Didugaa implementasi otonomi desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang ada di Desa Cipang Kanan.

b. Sampel

Mengingat peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga untuk penerikan sampel, peneliti memilih Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat desa.

a. Aparatur Pemerintah Desa

Dalam penarikan sampel Aparatur Pemerintah Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1: Sampel aparatur pemerintahan desa

No	Responden	Populasi	Sampel	Sampel
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Urusan	3	3	100%
4	Ketua BPD	1	1	100%
6	Sekretaris BPD	1	1	100%
7	Kepala Dusun	3	3	100%
Jumlah		11	11	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2009

Jadi jumlah sampel untuk aparat desa diambil semuanya yaitu sebanyak 11 orang

b. Masyarakat Desa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yaitu menggunakan teknik pengambilan teknik secara sengaja, dengan catatan sampel itu mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus solvin (Umar, 2003:147).

Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 1466. Sedangkan sampelnya sebagian populasi yang penulis ambil untuk mewakili populasi masyarakat desa sebanyak 43 orang

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1466}{1 + 1466(15\%)^2}$$

$$n = \frac{1466}{1 + 1466.0,0225}$$

$$n = \frac{1466}{1 + 32,985}$$

$$n = \frac{1466}{33,985}$$

$$n = 43$$

Untuk jumlah sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 53 orang karena peneliti mengambil sampel dari dua bagian, yaitu dari aparat pemerintahan desa dan dari masyarakat desa cipang kanan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, meliputi antara lain data hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan baik yang didapatkan melalui angket yang disebar, maupun hasil wawancara dengan responden penelitian.
- b. Data Sekunder, meliputi peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan, kebijakan atau program yang telah dijalankan berhubungan dengan Otonomi yang dimiliki desa, data tentang gambaran umum daerah penelitian, seperti kondisi geografis desa Cipang Kanan, jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, mata pencaharian, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah:

- a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan langsung pada objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang akan mendukung dalam penelitian.

- b. Kuesioner atau Angket

Yaitu mengajukan pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dalam bentuk pertanyaan tertutup (Closed Question), pertanyaan

yang di sajikan telah dirumuskan terlebih dahulu sehingga kemungkinan jawaban yang di berikan responden menjadi amat terbatas.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan yang menurut peneliti perlu penjelasan lebih lanjut. Teknik ini di gunakan sebagai pelengkap dari teknik sebelumnya dimana besar kemungkinan data yang di perlukan tidak terdapat dalam angket. Teknik ini dilakukan langsung berhadapan dengan responden dan dimana responden di minta untuk menjawab pertanyaan yang di berikan oleh peneliti.

E. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode Deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang di temui di lapangan, yang dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA CIPANG KANAN

A. Sejarah singkat Desa Cipang Kanan

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam pembangunan pada tingkat terendah, maka dibentuk suatu organisasi tata kerja pemerintahan dibawah pemerintahan Kecamatan yang bertanggungjawab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan perda Kabupaten Rokan Hulu No. 11 Tahun 2003 Pasal 5 Pemerintahan desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa dikepalai oleh seorang kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Desa Cipang Kanan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang bila dilihat dari letaknya cukup strategis karena berada pada lintas sumatera bagian barat, jarak nya ke Ibu Kota Provinsi 168, ke ibu kota Kabupaten 93 Km, dan Ibu kota Kecamatan 65 Km, Desa Cipang kanan di Pimpin oleh seorang Kepala Desa.

Di lihat dari potensi yang dimiliki oleh Desa Cipang Kanan baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alamnya (SDA) Sangat potensial. masyarakat Desa Cipang Kanan pada umumnya bermata pencarian bertani karena di dukung oleh lahan yang tersedia dan keadaan tanah nya yang subur.

Dari segi sarana pendidikan didukung oleh fasilitas yang cukup memadai yaitu, Pendidikan anak usia dini (PAUD) berjumlah 3 buah, Prasekolah Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 3 buah, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 buah, serta 1 buah bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan tempat ibadah terdiri dari 3 buah bangunan Mesjid,dan 3 buah bangunan tempat posyandu.

Musim tidak jauh berbeda dengan daerah lain yaitu musim panas dan musim hujan. Adapun batas-batas wilayah Desa Cipang Kanan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaiti
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kanagarian Muara Tais Timur,Pasaman Timur Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tibawan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lubuk Gadang, Pasaman Timur Sumatera Barat.

Semenjak di pimpin oleh Kepala Desa di Desa Cipang Kanan di mulai dari Tahun 1970-2010 baru di pimpin oleh empat (4) Kepala Desa yaitu :

Tabel IV.1: Nama-nama Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun masa menjabat
1	Samsudin L	1975-1993
2	Alwi	1994-2000
3	Samsudin Ahmad	2001-2006
4	Rinaldi	2007-Sekarang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Cipang Kanan 2009

B. Kedudukan Pusat Pemerintahan Desa Cipang Kanan

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No.11 Tahun 2003 pasal 6

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai:

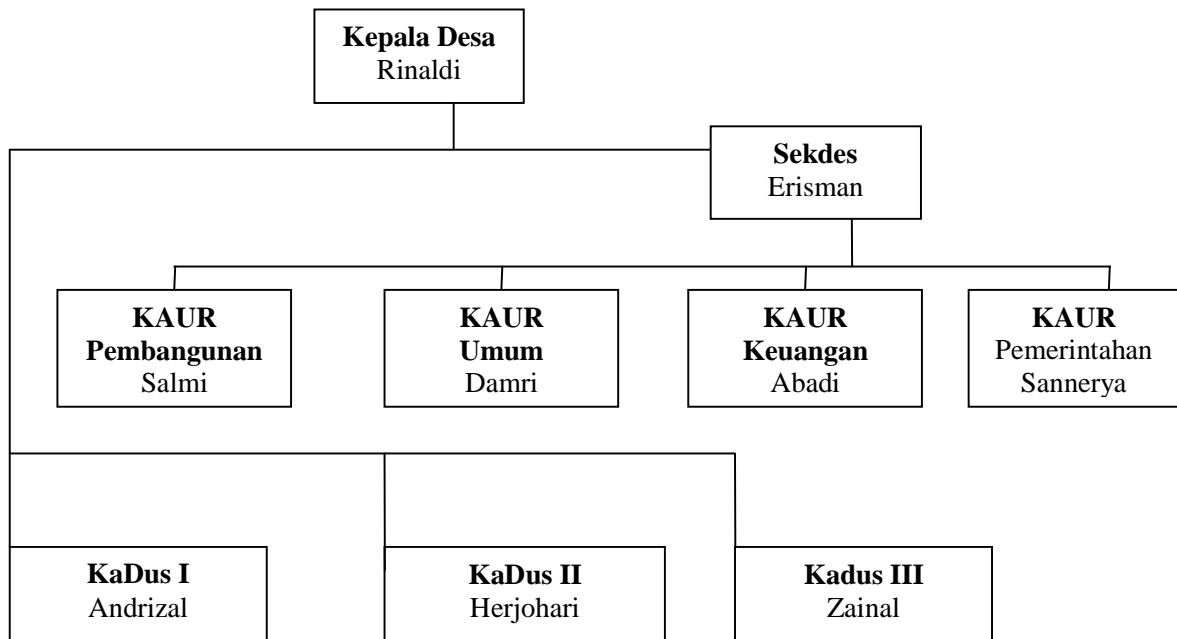
- a. Pimpinan Organisasi pemerintahan Desa bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerja sama pimpinan masyarakat lainnya.
- c. Pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. Susunan Organisasi

Ada pun susunan organisasi Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat Sebagai berikut:

BAGAN 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu



D. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pasal 5 (1) pemerintah Desa mempunyai Tugas:

- Membina kehidupan Desa
- Membina perekonomian Desa
- Mendamaikan Perselisihan masyarakat Desa

- d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai peraturan Desa bersama BPD

Adapun fungsi dari pemerintahan Desa adalah:

- a. Pelaksanaan Pembinaan Desa
- b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian Desa
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Desa
- e. Perumusan dan pengajuan Rancangan peraturan Desa dan menetapkan sebagai peraturan Desa bersama BPD.

b. Sekretaris Desa

Menurut pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa (2) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Memberi saran dan pendapat Kepada Kepala Desa
- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretaris Desa
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Desa dan keadaan Desa
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- e. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat
- g. Menyusun Rancangan pemerintahan dan Belanja Desa
- h. Mengadakan investasi kekayaan Desa

- i. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian aparat Desa
- j. Melekanankan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- k. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi Tanah dan pencabutan Administrasi Pertanahan
- l. Melaksanakan Administrasi kependudukan, Administrasi Pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.

c. Kepala Urusan

Menurut Peraturan Daerah pasal 8 (1) Kepala-kepala urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsure staaf pembantuu sekretaris Desa. Dan pada ayat (2) de jelaskan bahwa Kepala Urusan Pemerintahan Dalam Membantu Sekretaris Desa mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi penduduk (Kartu tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi Desa
- b. Membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkna kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Memberikan Saran dan pertimbangan kepada kepala Desa dalam Bidang Pemerintahan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu sekretaris Desa mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menetapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan Desa untuk dibicarakan dalam forum konsultan dengan BPD, melaksanakan bimbingan ketrampilan masyarakat dibidang pembangunan fisik Desa.
- b. Menyusun Pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
- c. Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung besar
- d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program Pembangunan Desa
- f. Membantu Usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
- g. Memberikan Saran dan pertimbangan kepada kepala Desa dalam bidang pembangunan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Kepala Urusan Umum dalam membantu sekretaris Desa mempunyai Tugas:

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat-menyerat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat-menyerat yang diminta tanda tangan Kepala Desa
- c. Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku investasi, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua urusan
- d. Mengatur rumah tangga sekretaris Desa, tamu-tamu kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya
- e. Mengurus pemeliharaan kendaraan Dinas, kebersihan Kantor dan sebagainya
- f. Melaksanakan Tugas-tugas lain

Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai Tugas:

- a. Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur
- b. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji perangkat Desa

- c. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodic program kerja bidang keuangan
- d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginvestasikan kekayaan Desa, (luas, status, penggunaan dan lain-lain)
- e. Memberikan Saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang Keuangan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Formasi dan Jumlah Organisasi Desa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa bersangkutan.

Pada pasal Sembilan (9)

- a. Kepala Dusun sebagaimana di maksud pasal tiga (3) ayat satu (1) Huruf b berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayahnya.
- b. Kepala Desa mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat dua (2)

Kepala Dusun mempunyai Fungsi :

- 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
- 2. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayahnya
- 3. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa

E. Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Cipang Kanan

Visi Kantor Kepala Desa Cipang Kanan

“Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat”

Misi Kepala Desa Cipang Kanan

- a. Mewujudkan Pelayanan yang Transparan dan Ramah
- b. Pelayan yang mempermudah tanpa membedakan status.

F. Jumlah dan komposisi Masyarakat

Berdasarkan Sumber data tahun 2009 yang didapat pada kantor Kepala Desa Cipang kanan penduduknya 1476 orang. Adapun komposisi masyarakat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.2

Tabel IV.2: Komposisi Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra sekolah/Tdak Pernah Sekolah	320
2	SD	370
3	SLTP	460
4	SLTA	297
5	SARJANA	30
Jumlah		1476

Sumber Data : kantor kepala Desa Cipang kanan 2009

Dari data tabel diatas IV.2 di atas jelaslah tingkat pendidikan masyarakat Cipang Kanan, dimana konsentrasi pendidikan terlihat pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 460, dan jenjang Pendidikan nomor dua Sekolah Dasar (SD) 370.

Tabel IV.3: Jumlah masyarakat di Desa Cipang Kanan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	638
2	Perempuan	835
Jumlah		1476

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cipang kanan 2009

Dari sumber data yang di peroleh dari Kantor Kepala Desa populasi masyarakat desa Cipang Kanan lebih didominasi oleh perempuan, hal ini dapat dilihat pada tabel IV. 3.

Tabel IV.4: Jumlah masyarakat Desa Cipang Kanan Menurut mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	52
2	Pedagang	130
3	Petani	918
4	Pensiun	20
5	Lain – lain	356
Jumlah		1476

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cipang Kanan 2009

Dari Tabel ini bisa dilihat komposisi jumlah mata pencarian Desa Cipang Kanan, bertani lebih mendominasi yaitu 918 dan lain-lainnya. Petani yang muda lebih mudah menerima inovasi baru di banding dengan petani yang sudah tua, dan petani muda lebih cepat bergerak secara dinamis dalam usaha lainnya.

Tabel IV.5: Jumlah Masyarakat Desa Cipang Kanan menurut Usia dalam Kelompok Pendidikan

No	Umur Kelompok Pendidikan	Jumlah
1	0 – 3	54
2	4 – 6	130
3	7 – 12	272
4	13 – 15	254
5	16 – 18	260
6	19 Keatas	506
Jumlah		1476

Sumbe Data: Kantor Kepala Desa Cipang Kanan 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat besarnya jumlah penduduk yang berusia 19 keatas, yang merupakan aset bagi Desa Cipang Kanan untuk produktifitas kerja.dan apabila pemerintah Desa Cipang Kanan memanfaatkan potensi yang amat berharga ini maka tidak tertutup kemungkinan semakin terbukanya peluang untuk mewujudkan gerak pembangunan kearah yang lebih baik seperti yang diinginkan oleh semua kalangan yang ada di Desa Cipang Kanan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sampel dalam penelitian ini adalah 53 orang, yaitu aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang ada di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini didasarkan pada tingkat pendidikan, jenis Kelamin, Mata pencarian, dan menurut Umur.

a. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Responden berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	6	11,3%
2	SLTP	15	28,9%
3	SMU	24	45,3%
4	Perguruan Tinggi	8	15,1%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan tabel tergambar bahwa pendidikan Formal Responden sebanyak 6 orang atau 11,3% berpendidikan SD, 15orang atau 28,3% berpendidikan SLTP, 24 orang atau 45,3% berpendidikan SMU, dan8 orang atau 15,1% lulusan perguruan tinggi.

b. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	28	52,8%
2	Perempuan	25	47,2%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden laki-laki 28 orang atau 52,8% dan responden Perempuan 25 orang atau 47,2%. Dan responden paling tinggi adalah responden laki-laki yaitu 52,8%.

c. Responden berdasarkan Jenis pekerjaan

Untuk melihat Distribusi penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

Tabel V.3: Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Responden	Persentase (%)
1	Tani	32	60,4%
2	Wirawasta	56	11,3%
3	PNS	10	18,9%
4	Pensiunan	5	9,4%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian lapangan 2010

Berdasarkan tabel V.3 diatas terlihat bahwa jenis pekerjaan responden paling banyak adalah Tani yaitu sebanyak 32 orang atau 60,4 %. Hal ini bisa disebabkan sebagian besar masyarakat Desa Cipang Kanan adalah petani sehingga dengan demikian yang menjadi tokoh dikalangan masyarakat kebanyakan berasal dari petani.

Dikalangan responden juga terdapat 6 orang atau 11,3% yang bekerja sebagai wirawasta, dan 10 orang atau 18,9% berasal dari kalangan PNS, dan 5 orang atau 9,4% dari kalangann Pensiunan.

d. Responden berdasarkan Umur

Sedangkan responden berdasarkan tingkat umur di Desa Taratak Buluh dapat dilihat pada tabel V.4 sebagai berikut:

Tabel V.4: Responden berdasarkan ingkat Umur

No	Tingkat Umur	Responden	Persentase (%)
1	<25 Tahun	7	13,2%
2	26-35 Tahun	10	18,9%
3	36-45 Tahun	12	22,6%
4	46-55 Tahun	15	28,3%
5	>56 Tahun	9	17%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan 2010

Dari tabel V.4 diatas bahwa dari 53 orang responden terdapat 7 orang atau 13,2% yang berumur 25 tahun atau kurang dari 25 tahun, sedangkan kelompok umur 26-35 Tahun sebangak 10 orang atau 18,9%, umur 36-45 Tahun 12 orang atau 22,6%, dan yang yang ber umur 46-55 tahun sebanyak 15 orang atau 28,3% terakhir >56 Tahun keatas 9 orang atau 17%.

**B. Implentasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV
Koto Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan bidang pemerintahan, sosila
budaya dan ekonomi**

Dengan adanya pengembalian sistem Pemerintahan Desa sebagai unit pemerinttahan terendah, untuk tahap awal dapat dirasakan sebagai langkah awal yang mengarah kepada keseriusan pemerintahan Daerah dalam pengakuan terhadap keberadaan Pemerintahan asli yaitu Desa dan komunitas adat yang ada dan berkembang dikalangan masyarakat berikut hak-hak Otonomi yang melekat pada desa. Hal ini disesuaikan apa yang ada dalam UUD 1945 pasal 18 dan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 93-111 yang mengakui Desa sebagai susunan asli yang memiliki Otonomi berdasarkan hak asal-usul, yang kemudian di revisi lagi kedalam UU No. 72 Tahun 2005 yang tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya yaitu tetap mengakui adanya Otonomi Desa sebagai susunan asli yang memiliki Otonomi berdasarkan hak asal-usul.

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman,

Seiring berjalannya kebijakan Otonomi desa cukup banyak menaruh harapan,terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak lah mengherankan kalau gagasan

Otonomi Desa menjadi isu sentral dikalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan Otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang nilai-nilai budayanya telah mengalami penghancuran secara sistematis akibat kesalahan rezim Orde Baru dalam penanganan dan pemaknaan pemerintah terendah pada masa lalu dengan melakukan penyelenggaraan Desa seluruh Indonesia berdasarkan UU No. 75 Tahun 1979.

Kebijakan revitalisasi Pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan relasi kuasa antara Negara dengan Komunitas politik lokal (Desa atau dengan nama lain), serta upaya penguatan masyarakat, terutama di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Untuk bidang politik misalnya, salah satunya diharapkan dapat tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat seiring dibukanya ruang politik yang lebih kondusif, dengan dilibatkannya segenap komponen masyarakat dalam pemerintahan, terutama unsur ninik mamak, dan Alim Ulama yang selama ini fungsi sosialnya cenderung dilemahkan. Sedangkan dalam bidang budaya, pengembalian eksistensi desa ditengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat memunculkan kembali jati diri masyarakat yang sekarang ini hampir hilang.

Seiring dengan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap proses pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Yang menjadi perhatian utama penulis dalam melakukan analisis tertuju kepada tiga bidang dalam mewujudkan Otonomi lokal, yang juga sebagai indikator penelitian, yaitu antara lain:

pertama, Otonomi dalam Bidang politik/Pemerintah, *Kedua*, Otonomi dalam bidang sosial budaya, *ketiga* Otonomi dalam bida Ekonomi.

a. Pelaksanaan Otonomi Desa dalam bidang Pemerintahan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bidang pemerintahan penulis hendaknya melihat sejauh mana hak-hak Otonomi yang melekat pada pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul mereka telah diberikan dan ditumbuhkan kembali. Dan selanjutnya juga dilihat dari keseluruhan hak-hak Otonomi yang telah diberikan tersebut, berapa banyak telah dilaksanakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa, maka dengan demikian akan diketahui sudah sejauh mana tujuan akhir dari pelaksanaan Otonomi dari segi Pemerintahan, yaitu menciptakan pemerintah yang baik (Good Governance) telah dapat dicapai.

Adapun sub indikator yang menjadi fokus perhatian penelitian dalam bidang pemerintahan adalah, perubahan watak dan budaya kerja, respointivitas pemerintah Desa terhadap permasalahan masyarakat, fungsi dan peranan setiap lembaga.

Dalam menganalisis Otonomi Desa digunakan data yang diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui penyebaran angket, berikut ini adalah jawaban responden mengenai Implemtasi Otonomi Desa dibidang pemerintahan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Jawaban responden mengenai kemampuan Pemerintah Desa di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	15	28,3%
2	Cukup Baik	31	58,5%
3	Kurang Baik	7	13,2%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai kemampuan pemerintah dalam mewujudkan perubahan dari pemerintahan terdahulu sampai sekarang yang menjawab “baik” sebanyak 15 orang atau 28,3%, dan “cukup baik” sebanyak 31 orang atau 58,5%, sedangkan “kurang baik” sebanyak 7 orang atau 13,2%.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kemampuan pemerintah dalam melakukan perubahan dalam urusan pemerintahan cukup baik yaitu persentase nya sebanyak 68,4%. Hal ini sangat penting dalam pencapaian Implementasi Otonomi Desa, karena kemampuan pemerintah itu sangat lah penting dalam menunjang terlaksananya Otonomi Desa sebab yang menjalankan desa itu adalah pemerintahan yang ada terdapat didalam desa tersebut.kalau pemerintahannya baik maka Desanya pun akan berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan kan masyarakat.

Dari jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa pemerintahan desa sudah mulai melakukan perubahan dari pemerintahan terdahulu hingga sekarang hal ini dapat dibuktikan jawaban responden yang menjawab cukup baik

Untuk melihat jawaban respon tentang pelayan yang di berikan oleh pemerintahan Desa Cipang Kanan sebagai berikut:

Tabel V.6: Jawaban responden tantang Pelayan Pemerintahan Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	10	18,9%
2	Cukup Baik	15	28,3%
3	Kurang Baik	28	52,8%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban dari responden yaitu yang menjawab “baik” ada 10 orang atau 18,9%, yang menjawab “cukup baik” sebanyak 15 orang atau 28,3%, sedangkan yang menjawab “kurang baik” sebanyak 28 orang atau 52,8%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah desa belum berjalan dengan baik, dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan Otonomi Desa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kurang baik hal ini terbukti banyaknya persentase yaitu 52,8%.

Untuk melihat jawaban responden tentang kelembagaan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7: Jawaban responden tentang kelembagaan Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	24,5%
2	Cukup Baik	19	35,9%
3	Kurang Baik	21	39,6%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas responden yang menjawab sudah terbentuknya kelembagaan seluruh organisasi sebanyak 13 orang atau 24,5% yang menjawab “baik”, dan 19 orang atau 35,9% yang menjawab “kurang baik”, sedangkan yang menjawab kurang baik sebanyak 21 orang atau 39,6%. Maka dapat dilihat bahwa kelembagaan yang ada di Desa Cipang Kanan kurang terbentuk dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang di berikan responden yaitu 39,9% menjawab kurang baik.

Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Otonomi Desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cipang Kanan, karena antara kelembagaan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan, jadi kalau kelembagaan sja belum terbentuk dengan baik bagaiman dengan pemerintahan yang akan menjalankan lembaga itu.

Sedangkan untuk melihat jawaban responden mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut:

Tabel V.8: Jawaban responden mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	12	22,6%
2	Cukup Baik	15	28,3%
3	Kurang Baik	25	47,2%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat kurang berjalan dengan baik tugas-tugas yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang dimiliki, padahal dalam pelaksanaan tugas sangat menunjang perubahan kearah yang lebih baik dalam mewujudkan Otonomi Desa yang ingin di capai. Dari tabel diatas dapat dilihat persentase yang dijawab responden yaitu, 12orang atau 22,6% yang menjawab “Baik”, dan yang menjawab “Cukup Baik” 15 orang atau 28,3%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 25 orang atau 47,2%.

Dari jawaban diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang berjalan dengan baik.

Persentase perencanaan penyusunan pembangunan yang ada di Desa Cipang Kanan dapat di lihat di bawah ini:

Tabel V.9: Perencanaan Penyusunan Pembangunan Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	14	26,4%
2	Cukup Baik	22	41,5%
3	Kurang Baik	17	32,1%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase responden dalam perencanaan Penyusunan Pembangunan Desa Cipang Kanan yaitu, responden yang menjawab baik sebanyak 14 orang atau 26,4%, dan responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 22 orang atau 41,5%, sedangkan responden yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 17 orang atau 32,1%. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan Penyusunan Pembangunan Desa Cipang Kanan pemerintahan desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat jumlah responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 41,5%.

b. Pelaksanaan Otonomi Desa dalam bidang sosial budaya

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Otonomi Desa tidak bisa hanya di maknai Administrasi (sebagai unit Pemerintahan terendah yang berwenang untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri dari unit pemerintahan yang lebih tinggi diatasnya) melainkan secara kultural. Hal ini disebabkan permasalahan sosial budaya merupakan sesuatu yang terintegral secara penuh dalam upaya penumbuhan dan penguatan Otonomi lokal.

Permasalahan dalam sosial budaya sangat penting di analisis, karena upaya penggalian nilai-nilai tradisional dalam pemerintahan desa yang sudah terkubur lebih kurang 20 tahun, bisa jadi menimbulkan pergeseran dengan realitas kontemporer masyarakat lokal yang ada sekarang ini.

Penilaian terhadap upaya penguatan pada bidang sosial budaya dalam rangka menunjang proses Implementasi otonomi Desa secara umum, dapat dilihat pada agenda aksi yang dilakukan oleh setiap Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Peranan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama dalam menjalankan Pemerintahan Desa
- c. Pelestarian Nilai-nilai adat/ kearifan lokal
- d. Penyatuan kembali budaya yang telah hilang dalam lingkungan masyarakat
- e. Menggerakkan kehidupan sosial masyarakat

Berdasarkan lima komponen-komponen diatas maka dapat diketahui sejauh mana proses Imlementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan dalam bidang sosial budaya, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.10: Jawaban Responden mengenai Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	17%
2	Cukup Baik	17	32%
3	Kurang Baik	27	51%
Jumlah		53	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapang 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui di Desa Cipang Kanan Pemberdayaan masyarakatnya masih rendah, sedangkan untuk Implementasi Otonomi Desa sangat tergantung pada faktor pemberdayaan masyarakat yang ada di

desa tersebut. Dari uraian tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang menjawab “baik” sebanyak 9 orang atau 17%, dan yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 17 orang atau 32%, sedang kan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 27 orang atau 51%.

Dalam hal Peranan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.11: Jawaban responden mengenai Peranan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	24,5%
2	Cukup Baik	21	39,6%
3	Kurang Baik	19	35,9%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui seberapa besar peranan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dalam mewujudkan Otonomi Desa dimana peranannya belum sepenuhnya berperan dalam hal pemerintahan Desa, karena peranan nya sudah mulai memudar dikalangan masyarakat seiring berjalannya zaman. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden sebagai berikut, dimana responden yang menjawab “Baik” sebanyak 13 orang atau 24,5%, dan yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 21 orang atau 39,6%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” 19 orang atau 35,9%.

Dalam hal kearifan lokal yang ada di Desa Cipang Kanan untuk menciptakan Otonomi Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.12: Jawaban responden mengenai kearifan lokal dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	12	22,6%
2	Cukup Baik	14	26,4%
3	Kurang Baik	27	51%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai kearifan lokal yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dapat dilihat sebagai berikut, yang menjawab “Baik” sebanyak 12 orang atau 22,6%, dan yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 14 orang atau 26,4%, sedangkan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 orang atau 51%.

Untuk menyatukan kembali ikatan sosial masyarakat yang selama ini hilang dalam masyarakat Desa Cipang Kanan, apakah pemerintah mampu menyatukan kembali dapat dilihat pada tabel V.13 berikut ini:

Tabel V.13: Jawaban Responden mengenai penyatuan kembali budaya yang hilang di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	24,5%
2	Cukup Baik	16	30,2%
3	Kurang Baik	24	45,3%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penyatuan kembali budaya yang telah hilang dalam masyarakat Desa Cipang Kanan berjalan agak lamban, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut, yang menjawab “Baik”

sebanyak 13 orang atau 24,5%, yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 16 orang atau 30,2% sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 24 orang atau 45,3%. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karna kalau kelamaan kebudayaan itu akan hilang begitu saja, dan bisa menghilangkan rasa kebersamaan di kalangan masyarakat maka akibatnya bisa memperlambat proses Imlementasi Otonomi Desa.

Untuk melihat jawaban responden dalam hal usaha pemerintah dalam menggerakkan kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.15: Jawaban responden mengenai usaha pemerintah dalam menggerakkan kehidupan sosial Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	24,5%
2	Cukup Baik	25	47,2%
3	Kurang Baik	15	28,3%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jawaban responden yang menjawab “Baik” sebanyak 13 orang atau 24,5%, yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 25 orang atau 47,2%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 15 orang atau 28,3%.

Dari jawaban responden diatas maka upaya pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan sosial kearah yang lebih baik sudah mulai dirasakan masyarakat Desa Cipang Kanan.

c. Pelaksanaan Otonomi Desa dalam bidang ekonomi

Dengan adanya Otonomi Desa yang digalakkan oleh pemerintah diharapkan kepada setiap desa mampu untuk menjalankan nya untuk mempercepat perkembangan desa ini sendiri baik dari pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa demi terciptanya perekonomian yang bagus yang bisa memajukan desa tersebut.

Dalam Otonomi Desa diberikan hak-hak dan kewenangan desa dalam mengelola aset-aset desa yang ada untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa dan juga untuk melihat sejauh mana pemerintahan desa berupaya meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian desa.

Untuk mengetahui sejauh mana proses Implementasi Otonomi Desa dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari jawaban responden yang terdiri dari bergai unsur masyarakat desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.16: Jawaban responden mengenai kemampuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Baik	11	20,8%
2	Cukup Baik	16	30,2%
3	Kurang Baik	27	49%
Jumlah		38	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat belum terlaksana dengan baik sedangkan pemerintah daerah sudah memberikan hak-hak kepada pemerintah desa untuk mengelola aset-aset desa untuk memajukan perekonomian desa, dan dari tabel diatas dapat dibaca kurang

baiknya pelaksanaan dalam meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu yang menjawab “baik” sebanyak 11 orang atau 20,8%, yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 16 orang atau 30,2%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 27 orang atau 49%.

Untuk melihat sejauh mana pemerintah Desa Cipang Kanan dalam mengelola aset-aset desa untuk pertumbuhan perekonomian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.17: Jawaban responden mengenai kemampuan pemerintah mengelola aset-aset Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	7	13,2%
2	Cukup Baik	9	17%
3	Kurang Baik	37	69,8%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang menjawab bagaimana pemerintah dalam mengelola aset-aset desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa Cipang Kanan, yaitu dapat lihat jawaban rresponden sebagai berikut, yang menjawab “Baik” yaitu sebanyak 7 orang atau 13,2%, dan yang menjawab “Cukup Banyak” sebanyak 9 orang atau 17%, sedangkan yang menjawab “Kurang baik” sebanyak 37 orang atau 69,8%.

Dari tabel diatas jelaslah bahwa belum mampunya pemerintah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki oleh desa

Dengan adanya Otonomi Desa yang diberikan oleh pemerintah maka diharapkan setiap desa untuk bisa menjalankannya supaya tercapai pembangunan

yang diharapkan, untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah desa setelah adanya Otonomi Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.18: Jawaban responden mengenai peningkatan pembangunan desa di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	11	20,8%
2	Cukup Baik	14	26,4%
3	Kurang Baik	28	52,3%
Jumlah		38	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa upaya peningkatan pembangun di Desa Cipang Kanan belum menunjukkan kearah yang lebih baik hal ini bisa dilihat dari jawaban responden, yang menjawab “Baik” sebanyak 11 orang atau 20,8%, yang menjawab “Cukup Baik” sebanyak 4 orang atau 26,4%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 28 orang atau 52,3%.

Melihat keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari dahulu sampai sekarang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.18: Jawaban responden mengenai perkembangan perekonomian masyarakat Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Ressponden	Reponden	Persentase (%)
1	Baik	16	39,2%
2	Cukup Baik	20	37,7%
3	Kurang Baik	17	32,1%
Jumlah		38	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat dari dahulu hingga sekarang, hasil dari ketignya hampir sama ini berarti

sudah ada perubahan kearah yang lebih baik dibanding dari dahulu. dapat dilihat dari persentase jawaban responden yaitu, yang menjawab “Baik” ada sebanyak 16 orang atau 39,2%, yang menjawab “Cukup Banyak” ada sebanyak 20 orang atau 37,7%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik sebanyak 17 orang atau 32,1%.

Dalam hal penyusunan anggaran belanja Desa Cipang Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.19: Jawaban responden mengenai penyusunan anggaran belaja Desa di Desa Cipang Kanan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	17%
2	Cukup Baik	15	28,3%
3	Kurang Baik	29	54,7%
Jumlah		53	100%

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang menjawab “Baik” sebanyak 9 orang atau 17%, dan yang menjawab “Cukup Baik” ada sebanyak 15 orang atau 28,3%, sedangkan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 29 orang atau 54,7%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya transparansi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang ada pada pemerintahan Desa Cipang Kanan.

C. REKAPITULASI DATA

Dari indikator-indikator variabel pada penelitian ini, maka selanjutnya dapat disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai Analisis Implementasi Otonomi Desa Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Tabel V.20: Rekapitulasi tanggapan responden mengenai Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator-indikator	Jawaban Responden			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah (%)
1	Bidang Pemerintahan	65	102	98	265 (100%)
2	Bidang Sosial Budaya	60	93	112	265 (100%)
3	Bidang Ekonomi	54	74	137	265 (100%)
Jumlah		179	269	347	795 (100%)
Rata		60 (22%)	90 (34%)	115 (44%)	265 (100%)

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari hasil rekapitulasi diatas dapat dilihat Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

- Jawaban responden pada jawaban “Baik” sebanyak 60 suara dari ketiga indikator-indikator yang ada atau 22%.
- Jawaban Responden pada jawaban “Cukup Baik” sebanyak 90 suara dari ketiga indikator atau 34%.

- c. Jawaban Responden pada jawaban “Kurang Baik” sebanyak 115 Suara dari ketiga indikator atau 44%.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu termasuk pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 93 suara atau 49% yang menjawab kurang baik. Hal ini bisa disebabkan kurang maksimalnya cara kerja dari pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dari hasil jawaban kuesioner yang disampaikan dan data-data yang diperoleh lapangan dan menganalisis bagaimana implementasi otonomi desa di Desa Cipang Kanan, maka penulis menyampaikan saran-saran yang berkemungkinan bisa bermanfaat sekaligus menjadi masukan bagi pihak pemerintah desa khususnya dalam peningkatan Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban yang responden peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi otonomi desa di Desa Cipang Kanan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab kurang baik cukup banyak yaitu sebanyak 44% dari keseluruhan responden. Proses Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan dilihat dari tiga bidang yaitu Pemerintah, Sosial Budaya, dan Ekonomi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan baru sebatas kelembagaan, pada prosesnya kelembagaan yang ada di Desa belum menunjukkan hasil yang baik untuk kemajuan desa, walaupun sebagian lembaga-lembaga di desa sudah mulai terbentuk tetapi lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam mekanisme pemerintahan desa.

- b. Sosial budaya secara umum sudah mulai berjalan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, hal ini dapat dilihat sudah adanya upaya pemerintah untuk memainkan tokoh masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) dalam menciptakan kehidupan di Desa Cipang Kanan.
- c. Ekonomi, dalam bidang perekonomian belum ada menunjukkan kearah yang lebih baik, hal ini dapat dilihat belum terkendalinya aset-aset desa yang ada yang bisa membantu untuk perkembangan ekonomi desa dan juga taraf hidup masyarakat desa.

Kurang berjalannya Proses Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kurang berjalannya kelembagaan yang ada di Desa

Pemerintah desa dan aparatur desa merupakan pelaksana yang paling utama dalam mewujudkan otonomi desa dan sangat dituntut untuk bisa memainkan perannya sebagai penggerak dari perubahan kearah yang lebih baik, karena pemerintah dan aparat pemerintahan lah yang menjadi acuan masyarakat untuk bisa bergerak kearah yang lebih maju.

- b. Kearifan lokal yang ada di desa

Dalam menjalankan pemerintahan yang ada desa setiap desa mempunyai kearifan lokal, dan kearifan lokal yang ada di Desa Cipang Kanan sudah mulai memudar di kalangan masyarakat seperti semangat gotong royong yang mengajarkan kita untuk

selalu bersama-sama dan saling membantu, hal ini dalam mewujudkan Otonomi Desa harus tetap dikembangkan untuk penyatuan masyarakat Desa Cipang Kanan

c. Kebudayaan yang ada di desa

Pemerintahan yang ada di desa sesuai dengan budaya yang ada dan yang sedang berkembang di masyarakat desa, dengan majunya zaman maka pemerintahan yang berlandaskan budaya yang ada di desa sudah mulai hilang seperti peran aktif tokoh masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) tidak begitu dominan lagi di kalangan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Implementasi Otonomi Desa di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Aparatur pemerintahan desa harus berusaha untuk melakukan proses belajar, demi tercapainya pemerintahan kearah yang lebih baik dan menuju konsep pemikiran baru di mana sekarang ini sudah ada kebebasan untuk desa menuju kearah yang lebih maju yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang ada di desa tersebut.
- b. Perlu adanya persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan perubahan karena masyarakat merupakan faktor utama dan juga muara dari perubahan yang akan dilakukan. Dan untuk itu masyarakat

harus memandang positif dan partisipasi terhadap segala upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan Implementasi Otonomi Desa

- c. Pemerintah desa harus transparan setiap apa yang akan dilakukan dan juga melibatkan semua masyarakat setiap apa yang akan dilakukan supaya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Karena selama ini banyak kebijakan yang diambil sendiri oleh pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dan padahal ciri pemerintahan yang baik adalah melakukan musyawarah dengan masyarakat.
- d. Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam segala hal, karena masyarakat butuh kenyamanan dalam setiap urusan yang ada. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan Otonomi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.W. Widjaja.2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Pambudi, S. Himawan , dkk.2003, *Politik pemberdayaan: jalan mewujudkan Otonomi Desa*, Lappera Pustaka Utama;Yogyakarta
- Juliantara,Dadang. 2000. *Arus bawah demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*,Lappera Pustaka Utama;Yogyakarta
- Sedermayanti. 2003, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektifitas dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan pemberdayaan*,Mandar Jaya;Bandung
- Yulianti.2003 *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Penerbit LP3ES;Jakarta
- Back, A James dan Dean J.C. 199 *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Repika Aditama; Bandung
- Kuncoro, Mudrajad,2004 *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga; Jakarta
- Macandrews, Colin.2003 *Hubungan pusat_daerah dalam pembangunan*, PT Raja grafindo persada; Jakarta
- Riyadi. 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT gamedia Pustaka Utama ; Jakarta
- Kansil C.S.T, 2006 *Otonomi Daerah, PT Pradnya Paramita;Jakarta*
- Guza, Afni.2009 *Himpunan Peraturan Desa, Kelurahan, Kecamatan, Asa Mandiri*; Jakarta,
- Abdullah, Rozali, 2006 *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan kepala daerah secara langsung*, PT Raja Grafindo Persada;Jakarta
- M. Manulang.2004 *Dasar-dasar Manajemen. PT Ghalia Indonesia*
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 tahun 2007 tentang tata kerja pemerintahan desa
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

- Santoso, purwo, dkk.2003, *Merubah watak Negara: strategi penguatan partisipasi Desa*, Lappera Pustaka Utama;Yogyakarta
- Wasisitiono Sadu & M. Irwan, Tahir.2007, *prospek pengembangan Desa. Fokus Media;Bandung*
- Siagian, SP.2005, *Kepemimpinan dan prilaku*, penerbit PT Gunung Agung;Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Program kerja Desa Cipang Kanan	8
Tabel I.2	Urusan Pembangunan	8
Tabel I.3	Urusan Pemerintah	9
Tabel I.4	Uruan kesejahteraan rakyat	9
Tabel I.5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban	9
Tabel I. 6	Kepala Dusun	10
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	36
Tabel IV.1	Nama-nama kepala desa	40
Tabel IV.2	Jumlah komposisi masyarakat menurut tingkat pendidikan	49
Tabel IV.3	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	50
Tabel IV.4	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Cipang Kanan	50
Tabel IV.5	Jumlah komposisi masyarakat menurut usia dalam kelompok pendidikan di Desa Cipang Kanan	51
Tabel V.1	Responden berdasarkan tingkat pendidikan	52
Tabel V.2	Responden berdasarkan jenis kelamin	53
Tabel V. 3	Responden berdasarkan jenis pekerjaan	53
Tabel V.4	Responden berdasarkan tingkat umur	54
Tabel V.5	Jawaban responden mengenai kemampuan pemerintahan desa di Desa Cipang Kanan	58
Tabel V.6	Jawaban responden mengenai pelayanan pemerintah Desa Cipang Kanan.....	59
Tabel V.7	Jawaban responden tentang kelembagaan Desa Cipang Kanan	60

Tabel V.8	Jawaban responden mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat Desa Cipang Kanan.....	61
Tabel V.9	Jawaban responden mengenai perencanaan penyusunan pembangunan Desa Cipang Kanan	61
Tabel V.10	Jawaban responden mengenai pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Cipang Kanan.....	63
Tabel V.11	Jawaban responden mengenai perananan Ninik Mamak Alim Ulama, Cerdik Pandai di Desa Cipang Kanan.....	64
Tabel V.12	Jawaban responden mengenai keaarifan lokal dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik di Desa Cipang Kanan	65
Tabel V.13	Jawaban responden mengenai penyatuan kembali budaya yang hilang di Desa Cipang Kanan.....	65
Tabel V.14	Jawaban responden mengenai usaha pemerintahan dalam menggerakkan kehidupan sosial Desa Cipang Kanan	66
Tabel V.15	Jawaban responden mengenai kemampuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cipang Kanan.....	67
Tabel V.16	Jawaban responden mengenai kemampuan pemerintah mengelola aset-aset Desa Cipang Kanan.....	68
Tabel V.17	Jawaban responden mengenai peningkatan pembangunan desa di Desa CipangKanan	69
Tabel V.18	Jawabab responden perkembangan perekonomian masyarakat Desa Cipang Kanan	69
Tabel V.19	Jawaban responden mengenai penyusunan anggaran belanja Desa di Desa Cipang Kanan	70
Tabel V. 20	Rekapitulasi hasil tanggapan responden.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Susunan struktur organisasi di kantor Kepala Desa Cipang

Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 43

KUESIONER PENELITIAN

A. KATA PENGANTAR

Dengan kuesioner ini, saya bermaksud mendapatkan data informasi untuk suatu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **ANALISIS IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA CIPANG KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU.**”

Untuk tercapainya tujuan tersebut maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I, untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini,

Atas partisipasi Bapak/ibu/sdr/I, saya ucapkan terima kasih.

Kuesioner ini berisi dua bagian yaitu :

1. Berisi identitas responden, untuk bagian ini Bapak/Ibu/Sdr/I cukup mengisi daftar identitas yang telah disediakan oleh penulis.
2. Berisi daftar pertanyaan, dan pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/I dianggap benar, dengan cara memberi tanda (X) pada jawaban yang dipilih.

B. KUESIONER PENELITIAN

1. Identitas Responden
 - a. No. Responden
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Umur :
 - d. Pendidikan :
 - e. Pekerjaan :
2. Pertanyaan.
 - II. Bidang Pemerintahan
 1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I Sejauh manakah kemampuan Pemerintahan Desa dalam melakukan perubahan dari Pemerintahan terdahulu sampai sekarang ?
 - a. Baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang Baik

2. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu/Sdr/I tentang Pelayanan yang di berikan Pemerintahan Desa Cipang Kanan ?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang Baik
3. Secara kelembagaan apakah seluruh Organisasi Pemerintahan Desa anda sudah terbentuk dengan baik ?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang baik
4. Dalam melaksanakan pemerintahan nya apakah antara Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik ?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang Baik
5. Bagaimanakah Pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa ?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang Baik